

DINAMIKA MONEY POLITICS TERHADAP INTEGRITAS PEMILU: STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI ENREKANG

Aulia Ramadhani Abdullah¹, Evi Irdawanti Anjasmira², Hijriani Ihda³, Muh Ridwan Said Ahmad⁴

auliaramadhani.a4@gmail.com¹, evi.irda8@gmail.com², ihdahijriani@gmail.com³,
m.ridwan.said.ahmad@unm.ac.id⁴

Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana dinamika money politics terhadap integritas pemilu di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari dinamika money politics pada pemilihan umum di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Hasil dan pembahasan dalam penelitian bahwa 1). Bentuk dinamika money politics terhadap integritas pemilu di Enrekang yakni sebagai berikut; (a) pembelian suara, (b) penyuapan, (c) pengarahan pemilih. 2). Dampak dinamika money politics pada pemilihan umum di Enrekang yakni merendahkan martabat rakyat, korupsi, dan dapat menyebabkan timbulnya konflik antara penyuap suara dan penerima suapan.

Kata Kunci: Pemilu dan Money Politics.

ABSTRACT

The aim of the research is to find out how the dynamics are money politics on the integrity of elections in Enrekang Regency and to find out the impact of the dynamics money politics in the general election in Enrekang Regency. The type of research used is qualitative research using literature study. The results and discussion in the research are that 1). Dynamic form money politics regarding the integrity of the elections in Enrekang, namely as follows; (a) vote buying, (b) bribery, (c) voter direction. 2). Impact dynamics money politics in the general election in Enrekang, namely degrading the dignity of the people, corruption, and could lead to conflict between vote bribers and bribe recipients.

Keywords: Elections and Money Politics.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Indonesia sangat mempertahankan Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup berbagai jenis hak, seperti hak untuk berpartisipasi. Salah satu hak politik yang dimiliki rakyat adalah memberikan suara mereka dalam pemilu. Indonesia mengadakan pemilihan terbuka untuk para pemimpin tingkat tinggi, mulai dari presiden hingga kepala desa. Meski dalam skala kecil seperti pemilihan kepala desa, pemilihan suara juga penting untuk memilih calon pemimpin yang baik bagi masyarakat.

Pemilu adalah rangkaian kegiatan yang mencakup dua aspek utama yang diatur dalam undang-undang: pertama, pemilih menunjukkan preferensi politik mereka; kedua, suara yang diberikan pemilih dapat diterjemahkan menjadi kursi dalam jabatan politik atau kekuasaan lainnya. (Riwanto, 2016, h. 53).

Dengan melakukan pemilihan umum, orang dapat secara bebas memilih anggota legislatif dan eksekutif mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena money politics telah menjadi masalah besar yang mengancam integritas dan keadilan pemilu. Istilah money politics mengacu pada praktik penggunaan uang dalam politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Di Indonesia, money politics sering kali diartikan sebagai uang sogok. Money politics adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dengan

menggunakan imbalan materi pada proses pemilu yang dijadikan sebagai alat atau tanda terima kasih. Kladen (Adinugroho et al., 2022, h.617) mengatakan bahwa Money politics dalam konteks sosiologi diartikan sebagai suatu bentuk perwujudan yang dikenal dengan istilah venality, istilah tersebut digunakan pada suatu keadaan yang mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang pada dasarnya sesuatu tersebut tidak bisa dibeli dengan uang.

Salah satu daerah yang beberapa tahun terakhir yang sering terjadi fenomena money politics yakni di Enrekang. Dalam konteks di Enrekang, uang seringkali digunakan untuk memengaruhi proses politik, mulai dari kampanye hingga pemilihan, yang dapat mengarah pada kecurangan, ketidakadilan, dan penurunan integritas Pemilu.

Dinamika money politics telah menjadi bagian dari proses politik di Enrekang, di mana uang seringkali digunakan sebagai alat untuk memengaruhi hasil pemilihan umum. Praktik money politics mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, serta penyusunan dan pengarahan pemilih. Fenomena ini telah menciptakan lingkungan politik yang rentan terhadap korupsi dan ketidakadilan.

Berbagai cara dan bentuk praktek money politics dilakukan. Praktek tersebut dengan cara konvensional seperti pemberian uang secara langsung, pemberian uang secara kelompok, pemberian uang saat rapat tim sukses, pemberian sembako, pemberian bantuan dana rumah ibadah, dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, praktek politik uang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga berupa janji-janji politik (Hawing & Hartaman, 2021, h. 46).

Dari uraian di atas, dinamika money politics terhadap integritas pemilu masih banyak dilihat dan dilakukan oleh para calon legislatif dan eksekutif pada saat ingin mencalonkan. Dengan hal ini yang akan dibahas lebih dalam dinamika money politics terhadap integritas pemilu (studi kasus pemilihan umum di Enrekang)..

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan studi pustaka. Tujuan penelitian dari studi pustaka yakni untuk mengumpulkan informasi terkait topik atau masalah penelitian ataupun cerita yang diangkat dari karya tulis non-ilmiah kemudian mendalami teori-teori dari berbagai sumber literatur yang relevan dan akurat terhadap penelitian ini.

Deskripsi fokus penelitian ini membahas terkait dinamika money politics terhadap integritas pemilu di kabupaten Enrekang. Bahan dan alat utama pada penelitian ini yakni, bahan utama penelitian ini adalah sumber ini perpustakaan dapat diperoleh seperti buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, internet, dan lain-lain sebagainya. Dari hasil pengumpulan data dari bahan utama yang berbagai sumber data kemudian dianalisis secara kritis guna untuk memastikan agar data-data yang diperoleh atau didapatkan akan sesuai dengan gagasan dari penelitian ini.

Sedangkan alat penelitian yang dimaksud adalah dari bahan utama yang relevan dan akurat dengan fokus pada penelitian, dimana alat utama yang digunakan pada penelitian ini seperti perangkat lunak yaitu mendeley yang berfungsi untuk menyusun dan membantu dalam mengelola data semua referensi literatur yang digunakan pada penelitian ini dan sebelumnya yang juga sudah dikumpulkan semuanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Dinamika Money Politics Terhadap Integritas Pemilu di Kabupaten Enrekang

Bentuk dinamika money politics yang sering banyak dilakukan di Enrekang yakni

pembelian suara. Pembelian suara adalah salah satu bentuk money politics yang paling umum. Untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, calon atau partai politik yang memiliki kekayaan dapat menggunakan uang untuk membeli dukungan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan uang tunai atau barang-barang material kepada pemilih untuk memastikan bahwa mereka memilih calon yang didukung oleh mereka. Praktik ini menghilangkan hak pemilih untuk memberikan suara secara bebas dan adil, merusak integritas pemilu.

Selain pembelian suara, bentuk dinamika money politics yang sering juga dilakukan dan ada di daerah Enrekang yakni penyuaipan dan pengarahan pemilih. Yang mana penyuaipan terjadi ketika pemilih diberikan sebuah imbalan untuk memilih calon tertentu. Sementara itu, pengarahan pemilih yakni upaya untuk mempengaruhi pemilih melalui propaganda atau manipulasi informasi. Bentuk praktik ini menjamin merusak integritas pemilihan dalam proses demokratis.

Salah satu peneliti yang pernah penelitian di Enrekang saat Pemilukada, (Hawing & Hartaman, 2021) saat Pemilukada bentuk atau modus yang banyak dilakukan yakni Pemberian sembako, uang tunai kepada kelompok-kelompok, janji-janji politik, serta pemberian uang secara personal atau yang dikenal sebagai "Serangan Fajar" kepada calon pemilih oleh bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya, sangat sering terjadi pada H-2 dan H-1 pemilihan. Praktik ini cukup masif dan berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat, terutama karena H-1 adalah kesempatan terakhir untuk memperebutkan suara. Pada hari pemilihan itu sendiri, "Serangan Fajar" melibatkan kandidat atau tim suksesnya yang memanfaatkan informasi terbaru mengenai harga satu suara dari para calon pemilih yang akan mencoblos.

Selain itu ada banyak bentuk dinamika money politics yang banyak juga terjadi di Indonesia. Hamdan Zoelva (Azka, 2021, h. 19) mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk politik uang yang umum terjadi di Indonesia yaitu:

1. Money politic pada tingkat atas melibatkan transaksi antara elit ekonomi atau pemilik modal dengan elit politik atau calon, di mana terdapat janji atau harapan bahwa kebijakan yang menguntungkan pemilik modal akan diterbitkan setelah mereka terpilih. Bentuk politik uang ini memiliki dampak strategis yang signifikan dalam kehidupan politik, karena pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon yang memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh anggota partai untuk menyumbang, sehingga partai cenderung mengambil jalan pintas dengan menerima dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon, atau bahkan menggunakan uang negara yang tidak halal.
2. Money politic pada lapisan tengah melibatkan transaksi antara elit politik, yaitu bakal calon, dengan elit partai. Ini bisa berupa pembayaran kepada elit partai individu untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon, atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.
3. Money politic pada lapisan bawah melibatkan transaksi antara elit politik atau calon dengan massa pemilih. Bentuknya bisa berupa uang, sembako, kredit ringan, atau pemberian barang lainnya yang tidak pantas.

Kaitan bentuk dinamika money politics terhadap integritas pemilu ini dengan teori

konflik yakni dimana pada inti dari teori konflik yakni pemahaman bahwa hubungan ekonomi di masyarakat kapitalis dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara kelas borjuise dan proletariat. Yang mana pada borjuise ini memanfaatkan sistem ekonomi kapitalis untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan memperkerjakan proletariat dengan upah rendah dan mengeksploitasi tenaga kerja mereka. Sehingga pada kaum borjuise dengan bentuk money politics ini seorang yang ingin masuk kedalam dunia politik dan mengeluarkan bentuk pembelian suara terhadap kaum proletariat yakni masyarakat yang ingin memilih terhadap kaum atau calon legislatif.

Kaum borjuise, yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan politik, cenderung menggunakan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk memperkuat posisi dominan mereka. Dalam konteks pemilihan umum, pembelian suara adalah salah satu bentuk money politics yang digunakan oleh borjuise untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan mereka.

B. Dampak Dinamika Money Politics Pada Pemilihan Umum Di Kabupaten Enrekang

Money politics ini memiliki dampak yang bertahan lama atau berjangka lama, sehingga jika dibiarkan akan merugikan semua orang. Hal ini tidak hanya akan merugikan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga dapat merugikan negara karena dapat menyebabkan banyak masalah baru. Selain itu, dampak politik uang ini dapat merusak demokrasi negara, sehingga jika dibiarkan akan menyebabkan banyak masalah baru

Dengan menggunakan praktik money politics, dampak yang terjadi yakni merendahkan martabat rakyat. calon legislatif atau partai tertentu telah merendahkan martabat rakyat. Mereka membayar martabat dan suara rakyat mereka dengan uang, yang tidak akan pernah sebanding dengan apa yang mereka dapatkan dalam lima tahun ke depan. Karena pemilih ditipu untuk kepentingan saat itu, proses ini merupakan pembodohan publik. Pelanggaran Hak Asasi Manusia disebabkan oleh kurangnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia atau martabat rakyat. Para calon legislatif memberikan uang dengan harapan masyarakat akan memilih mereka dalam pemilu, yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dampak money politics juga akan terjadi Korupsi. Calon atau partai politik yang menggunakan uang untuk memenangkan politik dapat terlibat dalam korupsi dengan memanfaatkan dana kampanye. Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dilakukan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat (Nabila et al., 2020, h. 149).

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 532 ayat (1) sampai (3), menyebutkan bahwa tindak pidana politik uang dapat terjadi selama kampanye, masa tenang, dan pada hari pemungutan suara. Pelaku politik uang dapat dipenjara hingga 4 tahun dan didenda hingga Rp. 48.000.000. Namun, ketentuan ini tidak cukup menakuti para kandidat untuk berhenti melakukan politik uang. Jika praktik ini

terus berlanjut, politik dan demokrasi di Indonesia akan rusak, menjadi alat bagi elit yang tidak berprestasi untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah berkuasa, mereka cenderung menyalahgunakan posisi mereka untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk politik uang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan korupsi keuangan negara. (Qotimah et al., 2020, 101).

Kaitan dampak dinamika money politics terhadap integritas pemilu ini dengan teori konflik yakni dimana Menurut teori konflik Marx, masyarakat kapitalis dibangun di atas konflik kelas antara borjuisie dan proletariat. Praktik money politik, seperti memberikan suap kepada pejabat pemerintah atau membiayai kampanye politik, sering kali dimanfaatkan oleh borjuisie untuk mempertahankan kekuasaan dan memperoleh keuntungan ekonomi.

Selain itu, money politics yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok berkuasa, seperti borjuisie, untuk memperkuat posisi mereka dalam struktur kekuasaan politik, dapat memperkuat ketidaksetaraan dan eksploitasi yang sudah ada dalam masyarakat kapitalis. Praktik ini menciptakan kesempatan untuk korupsi, di mana pemberian uang atau imbalan lainnya digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau mempertahankan kontrol atas sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks ini, money politik dapat menjadi instrumen bagi borjuisie untuk mempertahankan dominasi mereka atas proletariat dan memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan politik. Korupsi yang muncul dari money politik tidak hanya merugikan proletariat dengan meningkatkan eksploitasi dan ketidakadilan, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang sudah ada, yang selaras dengan kepentingan borjuisie.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan terkait dinamika money politics terhadap integritas pemilu di Enrekang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dinamika money politics terhadap integritas pemilu di Enrekang yakni sebagai berikut; (a) pembelian suara, (b) penyuapan, (c) pengarahan pemilih.
2. Dampak dinamika money politics pada pemilihan umum di Enrekang yakni merendahkan martabat rakyat, korupsi, dan dapat menyebabkan timbulnya konflik antara penyuap suara dan penerima suapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, 11(2), 615–624.
- Azka, N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaruh Money Politik Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kabupaten Bireuen (Studi Kasus: Gampong Pulo Naleung). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018). *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 138–153.
- Qotimah, C., Permata, N., Barokah, N., & Khasanah, U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93–105.

Riwanto, A. (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Thafa Media.